



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu menetapkan Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di daerah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah Kota yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintahan Daerah.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

5. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN di Pemerintah Daerah yang diberikan berdasarkan hasil penilaian Prestasi Kerja.
6. Jabatan Administrator yang selanjutnya disingkat JA adalah ASN yang menduduki suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Pemerintahan Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat yang berwenang.
7. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disingkat JP adalah ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Pelaksana Tugas. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat definitif yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan tetap.
10. Kelas/*Grade* adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
11. RSUD Cibabat adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi.
12. BLUD Air Minum adalah Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi.
13. Guru adalah Tenaga Pendidik yang ada di Kota Cimahi.
14. Puskesmas adalah Pusat Layanan Kesehatan yang ada di Kota Cimahi.
15. Tenaga Pendidik lainnya adalah Tenaga Pendidikan yang ada di Kota Cimahi.
16. Surat Perintah Melaksanakan Tugas selanjutnya disingkat SPMT.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
22. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
23. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan ASN diperuntukan bagi:

- a. JA;
- b. JF; dan
- c. JFT.

Pasal 3

Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan standar harga yang dibayarkan untuk Tambahan Penghasilan ASN.

Pasal 4

Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman untuk penyusunan APBD Daerah Kota.

Pasal 5

Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bagi JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bagi JF dan JFT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bagi JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dengan jenjang Jabatan Pelaksana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bagi JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dengan jenjang Jabatan Pelaksana yang diklasifikasikan sebagai pelaksana khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bagi ASN yang terdapat di:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat;
 - b. Puskesmas;
 - c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman BLUD Air Minum;
 - d. Kepala/Wakil Kepala Sekolah;
 - e. Guru; dan
 - f. Perangkat Sekolah,disebut tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan ASN bagi Pelaksana Tugas yaitu menggunakan Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Pegawai yang terbesar.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai yang terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perbandingan antara tambahan penghasilan pegawai definitif dengan tambahan penghasilan pegawai pada jabatan yang di rangkap sebagai Pelaksana Tugas.

Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan ASN dapat diberikan kepada Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yaitu yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Tambahan Penghasilan ASN yaitu tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas.

Pasal 13

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Jabatan yang diperbantukan/dipekerjakan meliputi Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN Kota yang diperbantukan/dipekerjakan di Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan berdasarkan Jabatan di SPMT.

Pasal 14

Jika JA dengan jenjang Jabatan Pelaksana ditetapkan sebagai:

- a. PPTK;
- b. PPK;
- c. Bendahara Pengeluaran / Pengeluaran Pembantu;
- d. Bendahara Penerima / Penerimaan Pembantu;
- e. Kustodian;
- f. Pengurus Barang Pengguna;
- g. Pengurus Barang Pembantu;
- h. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD;
- i. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu;
- j. Pejabat Pembuat Komitmen; Atau
- k. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

maka PNS tersebut diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pemberian Tambahan Penghasilan untuk PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk tahun 2021, diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak PNS tersebut ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, JFT Pengadaan Barang/Jasa yang dilantik pada awal April tahun 2021, diberikan tambahan penghasilan pegawai untuk masa

kerja bulan April sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara dirapel.

Pasal 18

Tambahan penghasilan pegawai dalam Peraturan Wali Kota ini dimaknai sebagai tunjangan kinerja ASN.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 511), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 Juni 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 627

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dinamika dalam Pemerintahan Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat delegasi kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Kota Cimahi, delegasi tersebut tercantum dalam Pasal 51 ayat (5).

Standar harga satuan ini merupakan pedoman untuk belanja daerah, selain itu standar harga satuan digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

Peraturan Wali Kota ini sebagai dasar hukum untuk pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 45 Tahun 2021

TANGGAL : 30 Juni 2021

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN TAMBAHAN
PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JABATAN ADMINISTRATOR

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
1.	Eselon II A	
	❖ Sekretaris Daerah	49.000.000
2.	Eselon II B	
	Asisten	
	❖ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	35.500.000
	❖ Asisten Perekonomian dan Pembangunan	35.500.000
	❖ Asisten Administrasi Umum	35.500.000
	Kepala Perangkat Daerah	
	❖ Sekretaris DPRD Kota Cimahi	30.000.000
	❖ Inspektur	31.000.000
	❖ Kepala Dinas Pendidikan	31.000.000
	❖ Kepala Dinas Kesehatan	31.000.000
	❖ Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.000.000
	❖ Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	30.000.000
	❖ Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30.000.000
	❖ Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	30.000.000
	❖ Kepala Dinas Perhubungan	30.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.000.000
	❖ Kepala Dinas Tenaga Kerja	30.000.000
	❖ Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	30.000.000
	❖ Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	30.000.000
	❖ Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.000.000
	❖ Kepala Dinas Lingkungan Hidup	30.000.000
	❖ Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	30.000.000
	❖ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31.000.000
	❖ Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	31.750.000
	❖ Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah	35.500.000
	❖ Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	30.000.000
	❖ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	30.000.000
	Staf Ahli	
	❖ Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	27.500.000
	❖ Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	27.500.000
	❖ Staf Ahli Bidang Administrasi, Keuangan dan Sumber Daya Manusia	27.500.000
3.	Eselon III A	
	❖ Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22.000.000
	❖ Kepala Kantor Kesatuan Bangsa	22.000.000
	❖ Camat Cimahi Utara	22.000.000
	❖ Camat Cimahi Tengah	22.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Camat Cimahi Selatan	22.000.000
	❖ Kepala Bagian Pemerintahan	18.500.000
	❖ Kepala Bagian Hukum	21.500.000
	❖ Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	18.500.000
	❖ Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	18.500.000
	❖ Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	19.500.000
	❖ Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	21.500.000
	❖ Kepala Bagian Organisasi	19.500.000
	❖ Kepala Bagian Umum	18.500.000
	❖ Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	18.500.000
	❖ Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD	18.500.000
	❖ Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD	18.500.000
	❖ Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD	18.500.000
	❖ Sekretaris Inspektorat	19.500.000
	❖ Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Aparatur	18.500.000
	❖ Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Fisik	18.500.000
	❖ Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi, Pengelolaan Keuangan dan Aset	18.500.000
	❖ Sekretaris Dinas Pendidikan	19.500.000
	❖ Sekretaris Dinas Kesehatan	19.500.000
	❖ Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.500.000
	❖ Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	18.500.000
	❖ Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.500.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	18.500.000
	❖ Sekretaris Dinas Perhubungan	18.500.000
	❖ Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.500.000
	❖ Sekretaris Dinas Tenaga Kerja	18.500.000
	❖ Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	18.500.000
	❖ Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	18.500.000
	❖ Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.500.000
	❖ Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	18.500.000
	❖ Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	18.500.000
	❖ Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19.500.000
	❖ Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.250.000
	❖ Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah	27.250.000
	❖ Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	18.500.000
	❖ Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	18.500.000
4.	Eselon III B	
	Dinas Pendidikan	
	❖ Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	16.000.000
	❖ Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	16.000.000
	❖ Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	16.000.000
	❖ Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	16.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	Dinas Kesehatan	
	❖ Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat	16.000.000
	❖ Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	16.000.000
	❖ Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	16.000.000
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	❖ Kepala Bidang Bina Marga	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Tata Ruang	15.000.000
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	❖ Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman	15.000.000
	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	❖ Kepala Bidang Sosial	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.000.000
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	
	❖ Kepala Bidang Perdagangan	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Perindustrian	15.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	Dinas Perhubungan	
	❖ Kepala Bidang Lalu Lintas	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Angkutan dan Penerangan Jalan Umum	15.000.000
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	❖ Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	15.000.000
	Dinas Tenaga Kerja	
	❖ Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	15.000.000
	Dinas Pangan dan Pertanian	
	❖ Kepala Bidang Ketahanan Pangan	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan	15.000.000
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
	❖ Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.000.000
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	❖ Kepala Bidang Penanaman Modal	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian	15.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	Dinas Lingkungan Hidup	
	❖ Kepala Bidang Tata Lingkungan	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Penataan Hukum Lingkungan	15.000.000
	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	
	❖ Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Kearsipan	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Perpustakaan	15.000.000
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	❖ Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi	16.000.000
	❖ Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	16.000.000
	❖ Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	16.000.000
1	❖ Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	16.000.000
	❖ Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	16.000.000
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	❖ Kepala Bidang Anggaran	16.750.000
	❖ Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan	16.750.000
	❖ Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	16.750.000
	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
	❖ Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan	23.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan	23.000.000
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	❖ Kepala Bidang Data, Kepangkatan dan Kesejahteraan	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Pendidikan Pelatihan	15.000.000
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	❖ Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	15.000.000
	❖ Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Masyarakat	15.000.000
	Kecamatan	
	❖ Sekretaris Kecamatan Cimahi Utara	16.000.000
	❖ Sekretaris Kecamatan Cimahi Tengah	16.000.000
	❖ Sekretaris Kecamatan Cimahi Selatan	16.000.000
5.	Eselon IV A	
	Lurah	
	❖ Lurah Cibabat	11.000.000
	❖ Lurah Cipageran	11.000.000
	❖ Lurah Citeureup	11.000.000
	❖ Lurah Pasirkaliki	11.000.000
	❖ Lurah Baros	11.000.000
	❖ Lurah Cigugur Tengah	11.000.000
	❖ Lurah Cimahi	11.000.000
	❖ Lurah Karangmekar	11.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Lurah Padasuka	11.000.000
	❖ Lurah Setiamanah	11.000.000
	❖ Lurah Cibeber	11.000.000
	❖ Lurah Cibeureum	11.000.000
	❖ Lurah Leuwigajah	11.000.000
	❖ Lurah Melong	11.000.000
	❖ Lurah Utama	11.000.000
	Sekretariat Daerah	
	❖ Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Administrasi Penyusunan Program	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	11.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	9.500.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Keuangan	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Perlengkapan	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Protokol	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan	10.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	9.000.000
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	❖ Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Humas, Protokol dan Publikasi	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Fasilitas Penganggaran	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Fasilitas Pengawasan	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	9.000.000
	Inspektorat	
	❖ Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan	9.500.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	Dinas Pendidikan	
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Keuangan	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	9.000.000
	❖ Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar	9.000.000
	Dinas Kesehatan	
	❖ Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Informasi	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan	9.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan	9.000.000
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	9.500.000
	❖ Kepala Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Jalan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	9.000.000
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	9.500.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Kepala Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Drainase Kota	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Utilitas	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Air Bersih	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Air Limbah	9.000.000
	❖ Kepala UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	10.000.000
	❖ Kepala UPTD Pemakaman	10.000.000
	❖ Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	10.000.000
	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	9.500.000
	❖ Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Keluarga Berencana	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan, Data Gender dan Anak	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	9.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	9.500.000
	❖ Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Bina Perdagangan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Koperasi	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Usaha Mikro	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Industri	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pemberdayaan Industri	9.000.000
	❖ Kepala UPTD Pasar	10.000.000
	❖ Kepala UPTD Cimahi Techno Park	10.000.000
	❖ Kepala UPTD Metrologi Legal	10.000.000
	Dinas Perhubungan	
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	9.500.000
	❖ Kepala Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Perparkiran	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Angkutan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Terminal	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum	9.000.000
	❖ Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	10.000.000
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	9.500.000
	❖ Kepala Seksi Identitas Penduduk	9.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pendataan Penduduk	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Kelahiran	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	9.000.000
	Dinas Tenaga Kerja	
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	9.500.000
	❖ Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	9.000.000
	Dinas Pangan dan Pertanian	
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	9.500.000
	❖ Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pertanian	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Perikanan	9.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Kepala UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT)	10.000.000
	❖ Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)	10.000.000
	Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	9.500.000
	❖ Kepala Seksi Kebudayaan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pariwisata	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Kepemudaan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Olahraga	9.000.000
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	9.500.000
	❖ Kepala Seksi Pengembangan Iklim Promosi	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pengendalian dan Pelaksanaan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Perizinan Pemanfaatan Ruang	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Perizinan Bangunan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Administrasi Perizinan Pemanfaatan Ruang	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Perizinan Perekonomian	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Administrasi Perizinan Perekonomian	9.000.000
	Dinas Lingkungan Hidup	
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	9.500.000
	❖ Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup	9.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Konservasi Lingkungan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Manajemen Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Sarana Prasarana Persampahan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pengaduan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	9.000.000
	❖ Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	10.000.000
	❖ Kepala UPTD Pelayanan Persampahan	10.000.000
	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Keuangan	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pelayanan Informasi	9.500.000
	❖ Kepala Seksi Data dan Statistik	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Persandian dan Pengembangan Sumber Daya Telematika	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pengelolaan Kearsipan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Layanan dan Promosi Kearsipan	9.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Kepala Seksi Pengadaan dan Pengolahan Perpustakaan	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Layanan dan Promosi Perpustakaan	9.000.000
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Keuangan	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup dan Kewilayahan	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian, dan Evaluasi	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam	9.500.000
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	10.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	10.000.000
	❖ Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran	10.000.000
	❖ Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	10.000.000
	❖ Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	10.000.000
	❖ Kepala Sub Bidang Akuntansi	10.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Kepala Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah	10.000.000
	❖ Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah	10.000.000
	❖ Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah	10.000.000
	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	16.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	16.000.000
	❖ Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Sistem Informasi Pajak Daerah	16.000.000
	❖ Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan	16.000.000
	❖ Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah	16.000.000
	❖ Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Keberatan	16.000.000
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	9.500.000
	❖ Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Jabatan	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Pensiun	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Karir	9.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	Kecamatan Cimahi Tengah	
	❖ Kepala Seksi Pelayanan Umum	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan	9.000.000
	Kecamatan Cimahi Selatan	
	❖ Kepala Seksi Pelayanan Umum	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9.000.000
	❖ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan	9.000.000
6.	Eselon IV B	
	Dinas Pendidikan	
	❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar	7.500.000
	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	8.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemakaman	8.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	8.000.000
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian	
	❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar	8.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Cimahi Techno Park	8.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	Dinas Perhubungan	
	❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	8.000.000
	Dinas Pangan dan Pertanian	
	❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT)	8.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)	8.000.000
	Dinas Lingkungan Hidup	
	❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan	8.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelayanan Persampahan	8.000.000
	Kecamatan Cimahi Utara	
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	9.000.000
	❖ Sekretaris Kelurahan Cibabat	8.000.000
	❖ Sekretaris Kelurahan Cipageran	8.000.000
	❖ Sekretaris Kelurahan Citeureup	8.000.000
	❖ Sekretaris Kelurahan Pasirkaliki	8.000.000
	❖ Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Cibabat	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Cipageran	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Citeureup	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Pasirkaliki	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Cibabat	7.500.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Kepala Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Cipageran	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Citeureup	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pasirkaliki	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibabat	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cipageran	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Citeureup	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Pasirkaliki	7.500.000
	Kecamatan Cimahi Tengah	
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	9.000.000
	❖ Sekretaris Kelurahan Baros	8.000.000
	❖ Sekretaris Kelurahan Cigugur Tengah	8.000.000
	❖ Sekretaris Kelurahan Cimahi	8.000.000
	❖ Sekretaris Kelurahan Karangmekar	8.000.000
	❖ Sekretaris Kelurahan Padasuka	8.000.000
	❖ Sekretaris Kelurahan Setiamanah	8.000.000
	❖ Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Baros	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Cigugur Tengah	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Cimahi	7.500.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Karangmekar	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Padasuka	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Setiamanah	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Baros	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Cigugur Tengah	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Cimahi	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Karangmekar	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Padasuka	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Setiamanah	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Baros	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cigugur Tengah	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cimahi	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Karangmekar	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Padasuka	7.500.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Setiamanah	7.500.000
	Kecamatan Cimahi Selatan	
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cimahi Selatan	9.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Cimahi Selatan	9.000.000
	❖ Sekretaris Kelurahan Cibeber	8.000.000
	❖ Sekretaris Kelurahan Cibeureum	8.000.000
	❖ Sekretaris Kelurahan Leuwigajah	8.000.000
	❖ Sekretaris Kelurahan Melong	8.000.000
	❖ Sekretaris Kelurahan Utama	8.000.000
	❖ Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Cibeber	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Cibeureum	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Leuwigajah	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Melong	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Utama	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Cibeber	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Cibeureum	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Leuwigajah	7.500.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Kepala Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Melong	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Utama	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibeber	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Cibeureum	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Leuwigajah	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Melong	7.500.000
	❖ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Utama	7.500.000

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 627

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 45 Tahun 2021

TANGGAL : 30 Juni 2021

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

JABATAN FUNGSIONAL

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
1.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	
	❖ Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	11.500.000
	❖ Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	10.000.000
	❖ Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	8.500.000
	❖ Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	7.000.000
2.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
	❖ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Utama	16.000.000
	❖ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	14.000.000
	❖ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	10.000.000
	❖ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	9.000.000
3.	Auditor	
	Auditor (Ahli)	
	❖ Auditor Utama	16.000.000
	❖ Auditor Madya	14.000.000
	❖ Auditor Muda	10.000.000
	❖ Auditor Pertama	9.000.000
	Auditor (Terampil)	
	❖ Auditor Penyelia	6.000.000
	❖ Auditor Pelaksana Lanjutan	5.000.000
	❖ Auditor Pelaksana	4.000.000

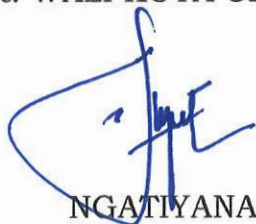
NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Auditor Pelaksana Pemula	3.000.000
4.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)	
	❖ P2UPD Utama	16.000.000
	❖ P2UPD Madya	14.000.000
	❖ P2UPD Muda	10.000.000
	❖ P2UPD Pertama	9.000.000
5.	Administrator Kesehatan	
	❖ Administrator Kesehatan Madya	9.000.000
	❖ Administrator Kesehatan Muda	7.500.000
	❖ Administrator Kesehatan Pertama	6.000.000
6.	Polisi Pamong Praja	
	Polisi Pamong Praja (Ahli)	
	❖ Polisi Pamong Praja Madya	9.000.000
	❖ Polisi Pamong Praja Muda	7.500.000
	❖ Polisi Pamong Praja Pertama	6.000.000
	Polisi Pamong Praja (Terampil)	
	❖ Polisi Pamong Praja Penyelia	6.000.000
	❖ Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	5.000.000
	❖ Polisi Pamong Praja Pelaksana	4.000.000
	❖ Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula	3.000.000
7.	Penyuluh Keluarga Berencana	
	Penyuluh Keluarga Berencana (Ahli)	
	❖ Penyuluh Madya	9.000.000
	❖ Penyuluh Muda	7.500.000
	❖ Penyuluh Pertama	6.000.000
	Penyuluh Keluarga Berencana (Terampil)	
	❖ Penyuluh Penyelia	6.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Penyuluh Pelaksana Lanjutan	5.000.000
	❖ Penyuluh Pelaksana	4.000.000
	❖ Penyuluh Pelaksana Pemula	3.000.000
8.	Penguji Kendaraan Bermotor (PKB)	
	❖ PKB Penyelia	6.250.000
	❖ PKB Pelaksana Lanjutan	5.250.000
	❖ PKB Pelaksana	4.250.000
	❖ PKB Pelaksana Pemula	3.250.000
9.	Mediator	
	Mediator (Ahli)	
	❖ Mediator Utama	11.500.000
	❖ Mediator Madya	10.000.000
	❖ Mediator Muda	8.500.000
	❖ Mediator Pertama	7.000.000
	Mediator (Terampil)	
	❖ Mediator Penyelia	7.000.000
	❖ Mediator Pelaksana Lanjutan	6.000.000
	❖ Mediator Pelaksana	5.000.000
	❖ Mediator Pelaksana Pemula	4.000.000
10.	Pengantar Kerja	
	Pengantar Kerja (Ahli)	
	❖ Pengantar Kerja Utama	11.500.000
	❖ Pengantar Kerja Madya	10.000.000
	❖ Pengantar Kerja Muda	8.500.000
	❖ Pengantar Kerja Pertama	7.000.000
	Pengantar (Terampil)	
	❖ Pengantar Kerja Penyelia	7.000.000
	❖ Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan	6.000.000
	❖ Pengantar Kerja Pelaksana	5.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	Arsiparis (Terampil)	
	❖ Arsiparis Penyelia	6.000.000
	❖ Arsiparis Pelaksana Lanjutan	5.000.000
	❖ Arsiparis Pelaksana	4.000.000
	❖ Arsiparis Pelaksana Pemula	3.000.000
14.	Pustakawan	
	Pustakawan (Ahli)	
	❖ Pustakawan Utama	10.500.000
	❖ Pustakawan Madya	9.000.000
	❖ Pustakawan Muda	7.500.000
	❖ Pustakawan Pertama	6.000.000
	Pustakawan (Terampil)	
	❖ Pustakawan Penyelia	6.000.000
	❖ Pustakawan Pelaksana Lanjutan	5.000.000
	❖ Pustakawan Pelaksana	4.000.000
	❖ Pustakawan Pelaksana Pemula	3.000.000
15.	Perencana dan Peneliti	
	❖ Perencana dan Peneliti Utama	10.500.000
	❖ Perencana dan Peneliti Madya	9.000.000
	❖ Perencana dan Peneliti Muda	7.500.000
	❖ Perencana dan Peneliti Pertama	6.000.000
16.	Analisis Kepegawaian	
	Analisis Kepegawaian (Ahli)	
	❖ Analisis Kepegawaian Madya	9.000.000
	❖ Analisis Kepegawaian Muda	7.500.000
	❖ Analisis Kepegawaian Pertama	6.000.000
	Analisis Kepegawaian (Terampil)	
	❖ Analisis Kepegawaian Penyelia	6.000.000
	❖ Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	5.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Analis Kepegawaian Pelaksana	4.000.000
	❖ Analis Kepegawaian Pelaksana Pemula	3.000.000
17.	Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya	
	Jabatan Fungsional (Ahli)	
	❖ Jabatan Fungsional Utama	10.500.000
	❖ Jabatan Fungsional Madya	9.000.000
	❖ Jabatan Fungsional Muda	7.500.000
	❖ Jabatan Fungsional Pertama	6.000.000
18.	Jabatan Fungsional (Terampil)	
	❖ Jabatan Fungsional Penyelia	6.000.000
	❖ Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan	5.000.000
	❖ Jabatan Fungsional Pelaksana	4.000.000
	❖ Jabatan Fungsional Pelaksana Pemula	3.000.000

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 627

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 45 Tahun 2021

TANGGAL : 30 Juni 2021


TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN TAMBAHAN
PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JABATAN PELAKSANA

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
1.	Perangkat Daerah	
	❖ Kelas/Grade 7 Bendahara Pengeluaran	5.250.000
	❖ Kelas/Grade 7	4.750.000
	❖ Kelas/Grade 6	3.750.000
	❖ Kelas/Grade 5	2.800.000
	❖ Kelas/Grade 4	2.600.000
	❖ Kelas/Grade 3	2.400.000
	❖ Kelas/Grade 2	2.200.000
	❖ Kelas/Grade 1	2.000.000
	❖ Tambahan Sebagai Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan / Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu	500.000
	❖ Tambahan Sebagai Pengurus Barang / Pengelola Barang / Pengurus Barang Pembantu	500.000
	❖ Tambahan Sebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan / Pejabat Penata Usahaan Keuangan Pembantu / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Kustodian	500.000

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATNYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 627

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 45 Tahun 2021

TANGGAL : 30 Juni 2021

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN TAMBAHAN
PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JABATAN PELAKSANA KHUSUS

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	
	Bagian Hukum	
	❖ Kelas/Grade 7 Analis Permasalahan Hukum/ Penyusun Rancangan Perundangan dan Rancangan Peraturan	6.750.000
	❖ Kelas/Grade 7	5.250.000
	❖ Kelas/Grade 6	4.250.000
	❖ Kelas/Grade 5	3.300.000
	❖ Kelas/Grade 4	2.900.000
	Bagian Administrasi Pembangunan	
	❖ Kelas/Grade 7	6.750.000
	❖ Kelas/Grade 6	6.250.000
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	
	❖ Kelas/Grade 7 Penelaah	9.000.000
	❖ Kelas/Grade 7 Analis dan Perancang	6.750.000
	❖ Kelas/Grade 6 Pengelola	6.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	Bagian Organisasi	
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7	6.750.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6	6.000.000
	Bagian Umum	
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7 Analis Tata Usaha Wali kota	7.000.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7 Analis Tata Usaha Wakil Wali Kota	6.750.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7 Analis Tata Usaha Sekretaris Daerah	6.750.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7 Analis Protokol	6.250.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6 Sekretaris Wali Kota	6.250.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6 Sekretaris Wakil Wali Kota	6.000.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6 Sekretaris Sekretaris Daerah	6.000.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6 Sekretaris Asisten	5.350.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7 Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah	6.750.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7 Bendahara Wali Kota dan Wakil Wali Kota	6.750.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7 Administrasi Keuangan	6.250.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6 Administrasi Keuangan	5.100.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7 Bagian Tata Usaha	5.250.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6 Bagian Tata Usaha	4.250.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 5 Bagian Tata Usaha	3.300.000
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6 Ajudan Wali Kota	6.350.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6 Ajudan Wakil Wali Kota	6.000.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6 Ajudan Sekretaris Daerah	6.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 5 Petugas Protokol/Pranata Acara	5.000.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 5 Pengemudi VIP Wali Kota	4.700.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 5 Pengemudi VIP Wakil Wali Kota	4.500.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 5 Pengemudi VIP Sekretaris Daerah	4.250.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 3 Pengemudi (Asisten)	3.300.000
	Bagian Sekretariat Daerah Lainnya	
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7	4.750.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6	3.750.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 5	2.800.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 4	2.400.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 3	2.000.000
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	❖ Sekretaris Pimpinan	6.000.000
	❖ Ajudan Pimpinan	5.500.000
3.	Inspektorat	
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7	5.250.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6	4.250.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 5	3.300.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 4	2.900.000
4.	Dinas Perhubungan	
	Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor	
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7	5.250.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6 /Bendahara Pembantu PKB	4.250.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 5	3.300.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 4	2.900.000
	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas Wali Kota	
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6	4.700.000
	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas Wakil Wali Kota	
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6	4.000.000
5.	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan	
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7 Analis Sistem Informasi/ Pengendali Teknologi Informasi/ Pengendali Jaringan Informasi	6.750.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7 Analis Publikasi/ Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	5.250.000
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	6.750.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7 Bendahara	5.750.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7	5.250.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6	4.250.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 5	3.300.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 4	2.900.000
7.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7 Analis Sistem Informasi	7.250.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7 Bendahara	6.750.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7	5.750.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6	4.750.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 5	3.800.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 4	3.400.000
8.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7	7.250.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6	6.050.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 5	4.700.000
9.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6 Pengelola Keamanan dan Ketertiban Wali Kota	4.700.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6 Pengelola Keamanan dan Ketertiban Wakil Wali Kota	4.000.000
	❖ Kelas / <i>Grade</i> 6 Personal Kebakaran	4.000.000
	❖ Kelas / <i>Grade</i> 5 Personal Kebakaran	3.050.000

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 627

LAMPIRAN V : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 45 Tahun 2021

TANGGAL : 30 Juni 2021

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN TAMBAHAN
PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

TUNJANGAN LAINNYA

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
1.	RSUD CIBABAT	
	❖ Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat	10.500.000
	❖ Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Cibabat	6.000.000
	❖ Wakil Direktur Pelayanan RSUD Cibabat	6.000.000
	❖ Kepala Bagian Administrasi Umum	5.000.000
	❖ Kepala Bagian Keuangan	5.000.000
	❖ Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis	5.000.000
	❖ Kepala Bidang Keperawatan	5.000.000
	❖ Kepala Sub Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat	3.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Kepegawaian	3.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	3.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran	3.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	3.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi	3.500.000
	❖ Kepala Seksi Pelayanan Medis	3.500.000
	❖ Kepala Seksi Penunjang Medis	3.500.000
	❖ Kepala Seksi Asuhan Keperawatan	3.500.000
	❖ Kepala Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan	3.500.000
	Jabatan Fungsional Tertentu	
	❖ Kelas/Grade 15	3.000.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	❖ Kelas/Grade 14	2.800.000
	❖ Kelas/Grade 13	2.800.000
	❖ Kelas/Grade 12	2.700.000
	❖ Kelas/Grade 11	2.500.000
	❖ Kelas/Grade 10	2.200.000
	❖ Kelas/Grade 9	1.850.000
	❖ Kelas/Grade 8	1.575.000
	❖ Kelas/Grade 7	1.350.000
	❖ Kelas/Grade 6	1.125.000
	❖ Kelas/Grade 5	1.000.000
	Jabatan Pelaksana	
	Kelas/Grade 7/ Bendahara	2.800.000
	❖ Kelas/Grade 7	2.000.000
	❖ Kelas/Grade 6	1.600.000
	❖ Kelas/Grade 5	1.200.000
	❖ Kelas/Grade 4	1.000.000
	❖ Kelas/Grade 3	850.000
	❖ Kelas/Grade 2	800.000
	❖ Kelas/Grade 1	750.000
	❖ Tambahan Sebagai Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan / Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu	500.000
	❖ Tambahan Sebagai Pengurus Barang Pengguna / Pengurus Barang Pembantu	500.000
	❖ Tambahan Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000
	❖ Kustodian	500.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
2.	PUSKESMAS	
	Tipe A	
	Jabatan Struktural/Fungsional Umum	
	❖ Kepala UPTD Puskesmas	4.200.000
	❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas	2.900.000
	❖ Kelas/Grade 8	2.900.000
	❖ Kelas/Grade 7	1.500.000
	❖ Kelas/Grade 6	1.100.000
	❖ Kelas/Grade 5	1.000.000
	Jabatan Fungsional Tertentu	
	❖ Kelas/Grade 11	2.000.000
	❖ Kelas/Grade 10	1.800.000
	❖ Kelas/Grade 9	1.500.000
	❖ Kelas/Grade 8	1.400.000
	❖ Kelas/Grade 7	1.100.000
	❖ Kelas/Grade 6	1.000.000
	Tipe B	
	Jabatan Struktural/Fungsional Umum	
	❖ Kepala UPTD Puskesmas	4.800.000
	❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas	3.100.000
	❖ Kelas/Grade 8	3.100.000
	❖ Kelas/Grade 7	1.700.000
	❖ Kelas/Grade 6	1.300.000
	❖ Kelas/Grade 5	1.100.000
	Jabatan Fungsional Tertentu	
	❖ Kelas/Grade 11	2.300.000
	❖ Kelas/Grade 10	2.000.000
	❖ Kelas/Grade 9	1.700.000
	❖ Kelas/Grade 8	1.600.000
	❖ Kelas/Grade 7	1.300.000
	❖ Kelas/Grade 6	1.200.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	Tipe C	
	Jabatan Struktural/Fungsional Umum	
	❖ Kepala UPTD Puskesmas	5.500.000
	❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas	3.700.000
	❖ Kelas/Grade 8	3.700.000
	❖ Kelas/Grade 7	1.900.000
	❖ Kelas/Grade 6	1.500.000
	❖ Kelas/Grade 5	1.200.000
	Jabatan Fungsional Tertentu	
	❖ Kelas/Grade 11	2.600.000
	❖ Kelas/Grade 10	2.200.000
	❖ Kelas/Grade 9	1.900.000
	❖ Kelas/Grade 8	1.700.000
	❖ Kelas/Grade 7	1.500.000
	❖ Kelas/Grade 6	1.300.000
	Tipe D	
	Jabatan Struktural/ Fungsional Umum	
	❖ Kepala UPTD Puskesmas	5.900.000
	❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas	4.000.000
	❖ Kelas/Grade 8	4.000.000
	❖ Kelas/Grade 7	2.200.000
	❖ Kelas/Grade 6	1.800.000
	❖ Kelas/Grade 5	1.300.000
	Jabatan Fungsional Tertentu	
	❖ Kelas/Grade 11	2.800.000
	❖ Kelas/Grade 10	2.500.000
	❖ Kelas/Grade 9	2.100.000
	❖ Kelas/Grade 8	1.800.000
	❖ Kelas/Grade 7	1.600.000
	❖ Kelas/Grade 6	1.400.000


NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	Tipe E	
	Jabatan Struktural/ Fungsional Umum	
	❖ Kepala UPTD Puskesmas	6.800.000
	❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas	4.200.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 8	4.200.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7	2.500.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6	2.000.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 5	1.500.000
	Jabatan Fungsional Tertentu	
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 11	3.000.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 10	2.700.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 9	2.400.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 8	2.000.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7	1.800.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6	1.700.000
	Tipe F	
	Jabatan Struktural/ Fungsional Umum	
	❖ Kepala UPTD Puskesmas	8.600.000
	❖ Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas	5.000.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 8	5.000.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7	3.000.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6	2.500.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 5	2.000.000
	Jabatan Fungsional Tertentu	
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 11	3.800.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 10	3.500.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 9	3.200.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 8	2.500.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7	2.200.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6	1.900.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	o Tambahan sebagai Bendahara Pengeluaran	1.000.000
	o Tambahan sebagai Bendahara Penerimaan	500.000
	o Tambahan Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu	500.000
	o Tambahan Sebagai Pengurus Barang Pengguna / Pengurus Barang Pembantu	500.000
	o Tambahan Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman BLUD Air Minum	
	o Kepala BLUD Air Minum	2.500.000
	o Kepala Sub Bagian Tata Usaha BLUD Air Minum	2.000.000
	o Kelas/Grade 7	1.187.500
	o Kelas/Grade 6	937.500
	o Kelas/Grade 5	700.000
	o Kelas/Grade 4	650.000
	o Kelas/Grade 3	600.000
	o Kelas/Grade 2	550.000
	o Kelas/Grade 1	500.000
	o Tambahan Sebagai Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan / Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu	500.000
	o Tambahan Sebagai Pengurus Barang Pengguna / Pengurus Barang Pembantu	500.000
	o Tambahan Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	500.000
	Jabatan Fungsional (Ahli)	
	o Jabatan Fungsional Utama	2.625.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	○ Jabatan Fungsional Madya	2.250.000
	○ Jabatan Fungsional Muda	1.875.000
	○ Jabatan Fungsional Pertama	1.500.000
	Jabatan Fungsional (Terampil)	
	○ Jabatan Fungsional Penyelia	1.500.000
	○ Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan	1.250.000
	○ Jabatan Fungsional Pelaksana	1.000.000
	○ Jabatan Fungsional Pelaksana Pemula	750.000
4	Dinas Pendidikan	
	Pengawas	
	❖ Pengawas Sekolah Utama	3.000.000
	❖ Pengawas Sekolah Madya	2.500.000
	❖ Pengawas Sekolah Muda	2.000.000
	❖ Pengawas Sekolah Pertama	1.500.000
	Penilik	
	❖ Penilik Utama	5.000.000
	❖ Penilik Madya	4.500.000
	❖ Penilik Muda	4.000.000
	❖ Penilik Pertama	3.500.000
	Pamong Belajar	
	❖ Pamong Belajar Utama	900.000
	❖ Pamong Belajar Madya	800.000
	❖ Pamong Belajar Muda	700.000
	❖ Pamong Belajar Pertama	600.000
	Kepala/Wakil Kepala Sekolah	
	❖ Kepala Sekolah	1.500.000
	❖ Wakil Kepala Sekolah	750.000

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
	Guru	
	❖ Sertifikasi Profesi	350.000
	❖ Non Sertifikasi Profesi	600.000
	Perangkat Sekolah	
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 7	2.750.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 6	2.250.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 5	1.750.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 4	1.550.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 3	1.450.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 2	1.350.000
	❖ Kelas/ <i>Grade</i> 1	1.250.000

Plt. WALI KOTA CIMAHI,


NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI


DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 627